



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MARON

Jalan Asmali No. 604 Maron 67276 Telp.(0335) 611552
email : puskesmasmaron25@gmail.com



PROBOLINGGO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MARON
NOMOR : 440/002/SK/426.102.24/2023

TENTANG
PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

KEPALA PUSKESMAS MARON,

- Menimbang** :
- a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan.
 - b. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada huruf a di atas, diperlukan adanya Keputusan Kepala Puskesmas Maron tentang Jenis – Jenis Pelayanan Puskesmas Maron.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

- 2012 ttg Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS PK;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri;
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun

- 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
 26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Sifilis, Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
 27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;
 28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
 29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Gawat Darurat;
 30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes;
 31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
 35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
 36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, 29. Standar Usaha No. KBLI: 86102 Aktivitas Puskesmas (halaman 649-686);

37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil; Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang HIV, AIDS dan IMS;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022, tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
41. Kepmenkes RI No 279/MENKES/SK/IV/2006 ttg Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
42. Kepmenkes RI No. 585/MENKES/SK/V/2007 ttg Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
43. Kepmenkes HK 02.02/MENKES/62/2015 ttg Panduan Praktik Klinis bagi dokter gigi;
44. Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama;
45. Kepmenkes No. HK.01.017/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama;
46. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
47. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
48. SE Dirjen P2P Kemenkes RI No. HK.02.02/I/1564/2018 ttg Penatalaksanaan ODHA untuk Eliminasi HIV AIDS;
49. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MARON TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS.

- KESATU** : Menetapkan jenis-jenis pelayanan dan jadwal pelayanan yang disediakan berdasarkan identifikasi dan analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas Maron dan jadwal layanan perlu di informasikan kepada masyarakat, lintas program, dan lintas sektor terkait melalui media komunikasi dan koordinasi, untuk meningkatkan kerja sama dan saling memberikan dukungan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan upaya lain yang terkait dengan kesehatan untuk mengupayakan pembangunan berwawasan kesehatan
- KETIGA** : Dengan berlakunya SK nomor 440/002/SK/426.102.24/2023 tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan Puskesmas Maron, maka SK nomor 440/176/SK/426.102.25/2022 tentang Jenis Pelayanan Puskesmas Maron sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS MARON



drg. Vinda Fitria Yon Surya, M.Kes

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MARON

NOMOR : 440/002/SK/426.102.24/2023

TENTANG : PENETAPAN JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS MARON

PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN :

1. Perencanaan dan Penggerakan Kegiatan dan Pelayanan Puskesmas
2. Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian Kinerja
3. Pencatatan dan Pelaporan serta Sistem Informasi Puskesmas
4. Pengelolaan Keuangan
5. Kepegawaian Puskesmas
6. Pengelolaan umum dan rumah tangga
7. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar
8. Pusat Informasi BPJS Kesehatan

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN :

1. Pendaftaran dan rekam medik
2. Pelayanan kesehatan umum
3. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
4. Pelayanan kesehatan ibu dan Keluarga Berencana (KB)
5. Pelayanan kesehatan anak dan imunisasi
6. Pelayanan tindakan dan gawat darurat
7. Pelayanan rawat inap
8. Pelayanan bersalin
9. Pelayanan gizi yang bersifat UKP
10. Pelayanan kefarmasian
11. Pelayanan laboratorium
12. Pelayanan fisioterapi
13. Pelayanan kesehatan lingkungan
14. Pelayanan kesehatan khusus
 - Pelayanan TB
 - Pelayanan HIV/AIDS
 - Pelayanan Kusta
15. Pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi
16. Prolanis

17. Pelayanan Pandu PTM

MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN :

1. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas
2. Manajemen bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3
3. Manajemen kedaruratan dan bencana
4. Manajemen pengamanan kebakaran
5. Manajemen alat kesehatan
6. Manajemen sistem utilitas
7. Pendidikan MFK

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA :

1. Pemeriksaan kesehatan pegawai secara berkala
2. Perlindungan pegawai dari penularan penyakit infeksi
3. Promosi kesehatan dan kesejahteraan (well being) pegawai
4. Perlindungan kekerasan pegawai dari pengguna layanan, keluarga pengguna layanan, maupun sesama pegawai

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL :

1. Upaya Promosi Kesehatan

Pelayanan Promosi Kesehatan adalah upaya kesehatan secara promotif dan preventif dengan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga serta lingkungannya secara mandiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan sosial budaya dan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Kegiatan Promkes meliputi:

- 1.1. Pengkajian PHBS, meliputi rumah tangga, institusi pendidikan, dan pondok pesantren;
- 1.2. Tatanan sehat, meliputi rumah tangga, institusi pendidikan, dan pondok pesantren;
- 1.3. Intervensi/Penyuluhan, meliputi kegiatan intervensi pada kelompok rumah tangga, kegiatan intervensi pada institusi pendidikan, serta kegiatan intervensi pada pondok pesantren;
- 1.4. Pengembangan UKBM, meliputi posyandu balita PURI dan poskesdes;
- 1.5. Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif, meliputi desa siaga aktif, desa siaga aktif PURI, dan pembinaan desa siaga aktif;

- 1.6. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan jaringannya (sasaran masyarakat) serta pengukuran dan pembinaan tingkat perkembangan UKBM.
2. Upaya Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pelayanan Kesling adalah upaya Promotif dan Preventif melalui pemeriksaan dan Pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat serta mencegah terjadinya gangguan Kesehatan dan penularan penyakit, kegiatan IKL, meliputi:
 - 2.1. Pengawasan dan Pembinaan tempat-tempat Umum;
 - 2.2. Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) TTU dan TPP
 - 2.3. Pengawasan dan pembinaan TPM
 - 2.4. Pengawasan SAB dan Sanitasi dasar Rumah
 - 2.5. Pengukuran parameter lingkungan
 - 2.6. Pemeriksaan sample makanan
 - 2.7. Home care
3. Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga yang Bersifat UKM :
 - 3.1. Upaya Kesehatan Ibu
 - 3.1.1. Kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1)
 - 3.1.2. Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (Pf) -SPM
 - 3.1.3. Pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan (KF)
 - 3.1.4. Penanganan komplikasi kebidanan (PK)
 - 3.1.5. Ibu hamil yang diperiksa HIV
 - 3.2. Upaya Kesehatan Bayi
 - 3.2.1. Pelayanan Kesehatan Neonatus pertama (KN1)
 - 3.2.2. Pelayanan Kesehatan Neonatus 0 - 28 hari (KN lengkap) -SPM
 - 3.2.3. Penanganan komplikasi neonates
 - 3.2.4. Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 11 bulan
 - 3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah
 - 3.3.1. Pelayanan kesehatan balita (0 - 59 bulan)
 - 3.3.2. Pelayanan kesehatan Anak pra sekolah (60 - 72 bulan)

- 3.4. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
 - 3.4.1. Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang melaksanakan pemeriksaan penjangkauan Kesehatan
 - 3.4.2. Sekolah setingkat SMP/MTs/SMPLB yang melaksanakan pemeriksaan penjangkauan Kesehatan
 - 3.4.3. Sekolah setingkat SMA/MA/SMK/SMALB yang melaksanakan pemeriksaan penjangkauan Kesehatan
 - 3.4.4. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 dan diluar satuan pendidikan dasar
 - 3.4.5. Pelayanan kesehatan remaja
- 3.5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
 - 3.5.1. KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR)
 - 3.5.2. Peserta KB baru
 - 3.5.3. Akseptor KB Drop Out
 - 3.5.4. Peserta KB mengalami komplikasi
 - 3.5.5. PUS dengan 4 T ber KB
 - 3.5.6. KB pasca persalinan
 - 3.5.7. CPW dilayanan kespro catin
- 3.6. Pelayanan Kesehatan Lansia
 - 3.6.1. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia \geq 60 tahun)
 - 3.6.2. Pelayanan Kesehatan pada Pra usia lanjut (45 - 59 tahun)
- 4. Upaya Pelayanan Gizi yang Bersifat UKM
 - 4.1. Pelayanan Gizi Masyarakat
 - 4.1.1. Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada balita (6-59 bulan)
 - 4.1.2. Pemberian 90 tablet Besi pada ibu hamil
 - 4.1.3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri
 - 4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi
 - 4.2.1. Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang
 - 4.2.2. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
 - 4.2.3. Balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar tatalaksana gizi buruk
 - 4.2.4. Pemberian Proses Asuhan Gizi di Puskesmas
 - 4.3. Pemantauan Status Gizi
 - 4.3.1. Balita yang di timbang berat badannya (D/S)
 - 4.3.2. Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)

- 4.3.3. Balita stunting (pendek dan sangat pendek)
- 4.3.4. Bayi usia 6 (enam) bulan mendapat ASI Eksklusif
- 4.3.5. Bayi yang baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini)

5. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit :

5.1. Diare

- 1.1.1. Pelayanan Diare Balita
- 1.1.2. Cakupan Pemberian Oralit dan Zinc pada Penderita Diare Balita
- 1.1.3. Pelaksanaan kegiatan Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)

5.2. Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA)

- 5.2.1. Cakupan Penemuan penderita Pneumonia balita
- 5.2.2. Penderita kasus pneumonia yang diobati sesuai standart

5.3. Kusta

- 5.3.1. Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru
- 5.3.2. RFT penderita Kusta
- 5.3.3. Proporsi tenaga kesehatan Kusta tersosialisasi
- 5.3.4. Kader Posyandu yang telah mendapat sosialisasi kusta
- 5.3.5. SD/ MI telah dilakukan screening Kusta

5.4. TB Paru

- 5.4.1. Kasus TBC yang ditemukan dan diobati
- 5.4.2. Persentase Pelayanan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (Standar Pelayanan Minimal ke 11)
- 5.4.3. Angka Keberhasilan pengobatan kasus TBC
- 5.4.4. Persentase pasien TBC dilakukan Investigasi Kontak

5.5. Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS

- 5.5.1. Sekolah (SMP dan SMA/ sederajat) yang sudah dijangkau penyuluhan HIV/AIDS
- 5.5.2. Orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV

5.6. Demam Berdarah Dengue (DBD)

- 5.5.3. Angka Bebas Jentik (ABJ)
- 5.5.4. Penderita DBD ditangani
- 5.5.5. PE kasus DBD

5.7. Malaria

- 5.7.1. Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan SD
- 5.7.2. Penderita positif Malaria yang diobati sesuai pengobatan standar
- 5.7.3. Penderita positif Malaria yang di follow up

- 5.8. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies
 - 5.8.1. Cuci luka terhadap kasus gigitan HPR
 - 5.8.2. Vaksinasi terhadap kasus gigitan HPR yang berindikasi
- 5.9. Pelayanan Imunisasi
 - 5.9.1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
 - 5.9.2. UCI desa
 - 5.9.3. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen
 - 5.9.4. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta
 - 5.9.5. Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar
 - 5.9.6. Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+
 - 5.9.7. Pemantauan suhu, VVM, serta Alarm Dingin pada lemari es penyimpanan vaksin
 - 5.9.8. Ketersediaan buku catatan stok vaksin sesuai dengan jumlah vaksin program imunisasi serta pelarutnya
 - 5.9.9. Laporan KIPI Zero reporting / KIPI Non serius
- 5.10. Pengamatan Penyakit (*Surveillance Epidemiology*)
 - 5.10.1. Laporan STP yang tepat waktu
 - 5.10.2. Kelengkapan laporan STP
 - 5.10.3. Laporan MR01 tepat waktu
 - 5.10.4. Kelengkapan laporan MR01
 - 5.10.5. Ketepatan Laporan W2 (format SKDR)
 - 5.10.6. Kelengkapan laporan W2 (format SKDR)
 - 5.10.7. Presentase Alert yang direspon peringatan ini KLB/Wabah (alert systems) minimal 80% di Puskesmas
 - 5.10.8. Desa/ Kelurahan yang mengalami KLB ditanggulangi dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam
- 5.11. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - 5.11.1. Fasyankes yang ada di wilayah Puskesmas melaksanakan KTR
 - 5.11.2. Sekolah yang ada di wilayah Puskesmas melaksanakan KTR
 - 5.11.3. Tempat Anak Bermain yang ada di wilayah Puskesmas melaksanakan KTR
 - 5.11.4. Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun
 - 5.11.5. Puskesmas menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)

- 5.11.6. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
- 5.11.7. Deteksi Dini Penyakit Hipertensi
- 5.11.8. Deteksi Dini Obesitas
- 5.11.9. Deteksi Dini Penyakit Diabetes Melitus
- 5.11.10. Deteksi Dini Stroke
- 5.11.11. Deteksi Dini Penyakit Jantung
- 5.11.12. Deteksi Dini Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK)
- 5.11.13. Deteksi Dini Kanker Payudara
- 5.11.14. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim
- 5.11.15. Deteksi Dini Gangguan Indera
- 5.11.16. Prosentase Penderita TB yang diperiksa Gula darahnya
- 5.12. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 5.12.1. Persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining
 - 5.12.2. Persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Fasyankes
 - 5.12.3. Jumlah kunjungan pasien pasung
 - 5.12.4. Persentase kasus pasung yang dilepaskan/dibebaskan
- 5.13. Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis B pada Ibu Hamil
 - 5.13.1. Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hami
 - 5.13.2. Tatalaksana bu Hamil dengan Hepatitis B Reaktiif

6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

Perawatan Kesehatan Masyarakat adalah suatu bidang keperawatan Kesehatan merupakan perpaduan antar keperawatan dan Kesehatan masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat yang mengutamakan pelayanan promotif, preventif, secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sebagai suatu kesatuan, melalui proses keperawatan untuk meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya, melalui kunjungan rumah.

Kegiatan Perkesmas meliputi:

- 6.1. Keluarga binaan yang mendapatkan asuhan keperawatan
- 6.2. Keluarga yang dibina dan telah Mandiri/ memenuhi kebutuhan Kesehatan
- 6.3. Kelompok binaan yang mendapatkan asuhan keperawatan
- 6.4. Desa/kelurahan binaan yang mendapatkan asuhan keperawatan

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN :

1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 - 1.1. PAUD dan TK yang mendapat penyuluhan /pemeriksaan gigi dan mulut
 - 1.2. Kunjungan ke Posyandu terkait kesehatan gigi dan mulut
2. Penanganan Masalah Penyalahgunaan NAPZA
 - 2.1. Persentase sekolah yang mendapatkan sosialisasi/penyuluhan tentang pencegahan & penanggulangan bahaya penyalahgunaan NAPZA
3. Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - 3.1. Penyehat Tradisional yang memiliki STPT
 - 3.2. Panti Sehat berkelompok yang berijin
 - 3.3. Pembinaan Penyehat Tradisional
 - 3.4. Kelompok Asuhan Mandiri yang terbentuk
 - 3.5. Kelompok Asuhan Mandiri yang mendukung Program Prioritas
4. Pelayanan Kesehatan Olahraga
 - 4.1. Kelompok /klub olahraga yang dibina
 - 4.2. Pengukuran Kebugaran Calon Jamaah Haji
 - 4.3. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan Olahraga internal
 - 4.4. Pengukuran kebugaran Anak Sekolah
5. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 5.1. Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)
 - 5.2. Puskesmas menyelenggarakan pembinaan K3 perkantoran
 - 5.3. Promotif dan preventif yang dilakukan pada kelompok kesehatan kerja informal
6. Kesehatan Haji (Matra)

Hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji 3 bulan sebelum operasional terdata.
7. Kefarmasian
 - 7.1. Kader aktif pada kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan masyarakat tentang obat pada Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat
 - 7.2. Jumlah wilayah yang dilakukan Kegiatan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat
 - 7.3. Jumlah masyarakat yang telah tersosialisasikan gema cermat

PELAYANAN JARINGAN PUSKESMAS :

1. Puskesmas Pembantu

Merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Puskesmas Maron memiliki 3 Puskesmas Pembantu sebagai berikut:

- 1.1. Pustu Kedungsari
- 1.2. Pustu Brabe
- 1.3. Pustu Brani Wetan

2. Ponkesdes

Sarana pelayanan Kesehatan yang berada di desa atau kelurahan dengan lebih mengutamakan promotif dan preventif dalam menjamin derajat kesehatan masyarakat di wilayah desa/kelurahan. Wilayah kerja Puskesmas Maron memiliki 8 Ponkesdes sebagai berikut:

- 2.1. Ponkesdes Maron Kulon
- 2.2. Ponkesdes Wonorejo
- 2.3. Ponkesdes Puspan
- 2.4. Ponkesdes Brani Kulon
- 2.5. Ponkesdes Satreyan
- 2.6. Ponkesdes Gerongan
- 2.7. Ponkesdes Sumberdawe
- 2.8. Ponkesdes Maron Kidul

3. Polindes

Pondok bersalin Desa (POLINDES) adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan Kesehatan ibu dan anak termasuk KB di desa. Polindes dirintis dan di Kelola oleh perangkat desa setempat. Wilayah kerja Puskesmas Maron memiliki 2 Polindes sebagai berikut :

- 3.1. Polindes Maron Wetan
- 3.2. Polindes Sumberpoh

4. Pusling

Kegiatan Puskesmas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan Promotif dan meningkatkan pelayanan P2

UKBM :

1. Posyandu balita

Posyandu Balita adalah bentuk UKBM (Upaya Kesehatan berbasis masyarakat) dengan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan Kesehatan yang meliputi kegiatan :

- 1.1. Pelayanan KIA-KB
- 1.2. Pemeriksaan Kesehatan Umum
- 1.3. Pelayanan Gizi
- 1.4. Imunisasi
- 1.5. Pengobatan Penyakit Ringan
- 1.6. Konseling dan Penyuluhan
- 1.7. Timbang BB dan Tinggi Badan
- 1.8. Pelayanan SDIDDTK
- 1.9. Pemberian Vitamin
- 1.10. Pemberian Makanan tambahan
- 1.11. Pemantauan status Gizi
- 1.12. Rujukan

2. Posyandu lansia

Posyandu Lansia adalah pelayanan Kesehatan secara promotif, preventif, dan kuratif terhadap lansia untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun penyakit tidak menular, kegiatan posyandu lansia meliputi:

- 2.1. Pemeriksaan Kesehatan umum dan penimbangan pada lansia
- 2.2. Kunjungan rumah lansia resti
- 2.3. Pengobatan penyakit ringan
- 2.4. Konseling dan penyuluhan
- 2.5. Perawatan Kesehatan masyarakat
- 2.6. Rujukan

3. Posbindu (PTM)

Posbindu adalah pelayanan Kesehatan secara promotive, preventif, dan kuratif terhadap masyarakat usia >15 tahun, sebagai upaya deteksi dini kemungkinan timbulnya penyakit untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun penyakit tidak menular, kegiatan posbindu meliputi:

- 3.1. Pemeriksaan kesehatan umum dan penimbangan
- 3.2. Pengobatan penyakit ringan
- 3.3. Konseling dan penyuluhan
- 3.4. Pemeriksaan laboratorium sederhana
- 3.5. Perawatan Kesehatan masyarakat

- 3.6. Penerapan Kawasan tanpa rokok
- 3.7. Fokus group diskusi (FGD) HT dan DM
- 3.8. Sekrening dan deteksi dini faktor resiko PTM
- 3.9. Sekrening perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah
- 3.10. Rujukan
4. Poskesdes
Pos Kesehatan Desa atau biasa di sebut dengan Poskesdes adalah upaya Kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah bagi Kesehatan masyarakat desa.
5. Desa siaga
Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
6. Poskestren
Poskestren merupakan salah satu wujud upaya Kesehatan bersumber Masyarakat (UKBM) di lingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh, dan warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif, preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif.
7. UKK
Pos UKK adalah bentuk pemberdayaan masyarakat di kelompok pekerja informal utamanya di dalam upaya promotif, preventif, untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan Kesehatan serta pengaruh buruk yang di akibatkan oleh pekerja
8. Taman posyandu
Taman Posyandu adalah Kegiatan yang diintegrasikan dengan program pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB).

KEPALA PUSKESMAS MARON



drg. Vira Patricia Yon Surya, M.Kes

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MARON

NOMOR : 440/002/SK/426.102.24/2023

TENTANG : PENETAPAN JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

JADWAL WAKTU LAYANAN

1. Pendaftaran

SENIN S/D KAMIS : 07.30 - 12.00 WIB

JUMAT : 07.30 - 10.00 WIB

SABTU : 07.30 – 11.00 WIB

2. Pelayanan Rawat Jalan

SENIN S/D KAMIS : 07.30 - 14.00 WIB

JUMAT : 07.30 - 11.00 WIB

SABTU : 07.30 – 12.30 WIB

3. Pandu PTM

SABTU : 07.30 – 12.30 WIB

4. Pelayanan IGD, Rawat Inap, Persalinan
24 JAM

KEPALA PUSKESMAS MARON



drg. Vita Patricia Yoni Surya, M.Kes